

Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia

Correlation analysis between the level of regional development and the regional disparity in Indonesia

Vera Azizah Adryawning^{1*} dan Dodi Widiyanto¹

¹Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

*Email korespondensi: veradryawning11@gmail.com

Abstrak. Ketimpangan menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan di negara berkembang. Variasi tingkat perkembangan wilayah mengarah pada munculnya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Di Indonesia, perkembangan wilayah dengan tingkat relatif tinggi terkonsentrasi di Pulau Jawa karena adanya konsentrasi pembangunan di pulau ini. Hal ini berdampak pada terjadinya ketimpangan terhadap provinsi-provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2018-2022; mengidentifikasi tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2018-2022; dan menganalisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dengan ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2018-2022. Metode yang digunakan adalah analisis faktor, analisis Indeks Williamson, analisis korelasi *rank spearman*, dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia sepanjang 2018-2022. Selain itu, terjadi hubungan antara ketimpangan wilayah dengan tingkat perkembangan wilayah pada beberapa faktor di tahun 2018 hingga 2022.

Kata Kunci: Ketimpangan Wilayah; Korelasi; Perkembangan Wilayah

Abstract. Inequality is one of the typical problems in developing countries. Variations in the level of regional development lead to the emergence of developed and underdeveloped regions. In Indonesia, regional development with a relatively high

level is concentrated on the island of Java due to the concentration of investment on this island. Therefore, this study was conducted with the aim of identifying the level of regional development in Indonesia in 2018-2022; identifying the level of regional inequality in Indonesia in 2018-2022; and analyzing the relationship between the level of regional development and regional inequality in Indonesia in 2018-2022. The methods used were factor analysis, Williamson Index analysis, Spearman rank correlation analysis, and spatial analysis. The results of the study showed that there were variations in the level of regional development and regional inequality in Indonesia in 2018-2022. In addition, there were a significant relationship between regional inequality and the level of regional development in several factors in 2018 to 2022.

Keywords: Correlation; Regional Development; Regional Disparity

1. Pendahuluan

Pembangunan wilayah merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pembangunan [1]. Dalam pembangunan wilayah, perencanaan menjadi aspek penting yang harus ada. Perencanaan ini dilakukan dengan dasar tujuan pembangunan yang ingin dicapai, salah satunya adalah pemerataan kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di setiap wilayah. Perbedaan potensi sumber daya di setiap wilayah berdampak pada berbedanya program pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun demikian, pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh di setiap wilayah sehingga terjadi kesetaraan. Berdasarkan potensi wilayah yang berbeda-beda, pembangunan wilayah juga dilaksanakan berbeda-beda. Adanya perbedaan ini berdampak pada tingkat perkembangan wilayah yang berbeda-beda pula yang kemudian menimbulkan ketimpangan.

Ketimpangan wilayah karena pembangunan yang tidak merata menjadi isu pembangunan di negara berkembang [2]. Hal ini juga terjadi di Indonesia karena pembangunan yang dilakukan berbeda-beda. Perbedaan ini didasarkan pada karakteristik wilayah yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, pembangunan di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut Andiyani & Rachmat [3], Pulau Jawa menyumbang 60% dari perekonomian nasional. Pusat pemerintahan yang berlokasi di Pulau Jawa juga berdampak kondisi perekonomian tersebut. Pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa membuat wilayah lain yang jauh dari ibukota seolah-olah belum tersentuh dengan baik [4]. Terpusatnya pembangunan ini mengakibatkan adanya disparitas sehingga kemajuan wilayah berbeda satu sama lain.

Ketimpangan yang terjadi di Indonesia secara umum dapat dilihat pada Pulau Jawa dan luar Jawa. Lebih majunya pembangunan di Pulau Jawa berhubungan dengan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan yang ada di pulau lain. Selain itu, menurut data BPS [5] Pulau Jawa juga mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66%. Jika dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015, salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan di daerah

tertinggal [6]. Ibu kota negara yang berada di Pulau Jawa, yaitu Jakarta kemudian dipindah ke Kalimantan Timur menjadi cara pemerintah dalam pembangunan yang dinilai “Jawa Sentris” [7]. Dengan adanya pemindahan ibukota negara ini pemerataan pembangunan diharapkan dapat terjadi di Indonesia.

Penelitian terkait tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah telah dilakukan sebelumnya. Dewi [8] dalam penelitiannya meneliti mengenai perkembangan wilayah dan kesenjangan untuk memberikan arahan pembangunan. Selain itu, Efendi & Daryono [9] juga mengkaji mengenai tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan untuk menentukan arahan pembangunan. Ginting [10] dalam penelitiannya menganalisis mengenai tingkat perkembangan wilayah dan disparitas antar wilayah pada wilayah yang mengalami pemekaran. Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terkait topik perkembangan dan ketimpangan wilayah dilakukan dengan judul “Analisis Hubungan Tingkat Perkembangan Wilayah dengan Ketimpangan Wilayah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2018-2022; (2) mengidentifikasi tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2018-2022; dan (3) menganalisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dengan ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2018-2022.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut Martono [11], penelitian kuantitatif menjadi jenis penelitian dengan data angka yang akan menghasilkan informasi setelah data tersebut diolah dan dianalisis. Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan data sekunder yang berasal dari instansi terkait. Beberapa metode analisis yang digunakan seperti analisis faktor, indeks Williamson, analisis korelasi *rank spearman*, dan analisis spasial.

2.1. Analisis faktor

Salah satu metode statistik multivariat yang bertujuan untuk mereduksi informasi sehingga membentuk sekelompok variabel yang lebih kecil adalah analisis faktor [8]. Metode ini memiliki tujuan utama untuk membentuk informasi yang lebih ringkas dengan membentuk faktor baru. Jumlah data yang digunakan dalam analisis ini juga akan berkurang karena metode ini akan menemukan faktor baru yang dapat menjelaskan sejumlah data terkait. Penelitian ini memanfaatkan analisis faktor untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2018-2022. Variabel yang digunakan dan sumber datanya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel penelitian.

	Dimensi	Indikator/Variabel	Sumber Data
1	Ekonomi	PDRB per kapita (ribu rupiah)	BPS (2019-2023)
2		Laju pertumbuhan PDRB (%)	
3		Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	
4	Sosial	Rata-rata lama sekolah (tahun)	
5		Angka melek huruf (%)	
6		APS 7-12 tahun (%)	
7		APS 13-15 tahun (%)	
8		APS 16-18 tahun (%)	
9		Angka harapan hidup (tahun)	
10		Penduduk yang tidak memiliki keluhan kesehatan (%)	
11	Balita mendapatkan imunisasi lengkap (%)		
12	Laju pertumbuhan penduduk (%)		
13	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)		
14	Penduduk tidak miskin (%)		
15	Infrastruktur dan pelayanan publik		Rasio murid SD/ sederajat terhadap jumlah SD/ sederajat (%)
16			Rasio murid SMP/ sederajat terhadap jumlah SMP/ sederajat (%)
17			Rasio murid SMA/ sederajat terhadap jumlah SMA/ sederajat (%)
18			Rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk (%)
19			Perempuan yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan (%)
20			Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)
21		Panjang jalan (km)	
22	Lingkungan	Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	
23		Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	
24	Teknologi,	Rumah tangga menguasai komputer (%)	
25	Informasi, dan Komunikasi	Rumah tangga menguasai telepon kabel (%)	

Analisis yang dilakukan pada metode analisis faktor dapat dimulai dari melihat nilai KMO dan *Bartlett's Test of Sphericity*. Ketika analisis faktor menghasilkan nilai KMO > 0,5, berarti nilai tersebut telah dianggap cukup [12]. Selain itu, nilai signifikansi yang memenuhi syarat adalah nilai <0,05 [12]. Langkah selanjutnya adalah melihat variabel yang dapat digunakan dimana variabel tersebut memiliki nilai MSA > 0,5 [13].

Tabel *Rotated Component Matrix* dapat digunakan untuk melihat variabel apa saja yang membentuk faktor tersebut. Tingkat perkembangan wilayah setiap faktor dapat dilihat dari

skor faktor yang terbentuk. Selain itu, indeks komposit TPW juga dapat ditentukan dengan metode ini dengan rumus menurut Albab dkk. [14] adalah sebagai berikut:

$$TPW = \sum \% \text{ of variance} \times \text{skor faktor}$$

2.2. Indeks Williamson

Ketimpangan yang terjadi antar daerah dapat diukur dengan indeks Williamson. Data PDRB per kapita dan jumlah penduduk menjadi data yang digunakan dalam metode ini. Menurut Sjafrizal [15] indeks Williamson dapat dihitung dengan rumus:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot F_i / n}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

- IW = Nilai Indeks Williamson
- Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i
- \bar{Y} = PDRB per kapita rata-rata provinsi
- F_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i
- n = Jumlah penduduk provinsi

Nilai yang dihasilkan pada metode ini antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilainya, kesenjangan yang terjadi semakin tinggi. Menurut Widodo [16], kriteria ketimpangan menurut indeks Williamson dapat dibagi seperti dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Kriteria ketimpangan indeks Williamson.

Nilai Indeks Williamson	Tingkat Ketimpangan
$0,1 < IW < 0,35$	Rendah
$0,35 < IW < 0,50$	Sedang
$IW > 0,50$	Tinggi

2.3. Analisis korelasi rank spearman

Salah satu cara untuk melihat hubungan antar variabel adalah dengan analisis korelasi [17]. Analisis korelasi *rank spearman* dapat digunakan untuk data yang berupa data ordinal dengan distribusi data yang tidak harus normal [18]. Penelitian ini menggunakan variabel TPW dan ketimpangan wilayah. Ketika nilai signifikansi $> 0,05$ maka terjadi korelasi antar variabel yang digunakan [19]. Selain itu, dapat pula dilihat pada koefisien korelasi untuk melihat arah dan kekuatan hubungannya. Kekuatan hubungan hasil analisis korelasi menurut Care dkk. [20] terbagi seperti dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Kriteria kekuatan analisis korelasi.

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,19	Sangat Lemah
0,20 – 0,39	Lemah
0,40 – 0,59	Cukup Kuat
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

2.4. Analisis spasial

Analisis spasial digunakan untuk melihat suatu fenomena dari sisi spasial. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan peta. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dengan membentuk peta tematik yang menggambarkan hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan ketimpangan wilayah di Indonesia.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Tingkat Perkembangan Wilayah (TPW)

Analisis TPW dilakukan dengan metode analisis faktor untuk tahun 2018 hingga 2022. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat jumlah faktor yang berbeda dalam lima tahun tersebut. Di tahun 2018, iterasi dilakukan sebanyak enam kali untuk memenuhi syarat analisis faktor. Setelah dilakukan iterasi enam kali, didapatkan 4 faktor baru, yaitu faktor 1 (pembangunan manusia), faktor 2 (pembangunan sosial), faktor 3 (kesejahteraan rakyat), dan faktor 4 (infrastruktur ekonomi). Skor faktor dan indeks komposit tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2018 seperti dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Klasifikasi tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2018.

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW				
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Komposit
1	Aceh	1,082395	-0,794721	-0,201047	-0,589634	26,91561
2	Sumatera Utara	0,397335	-0,198120	0,088048	-0,268403	13,25710
3	Sumatera Barat	0,575926	0,352031	-0,036648	-0,682386	24,79559
4	Riau	0,443465	-0,440860	0,481525	0,196880	19,75490
5	Jambi	0,398630	-0,383541	-0,173558	-0,231835	7,06774
6	Sumatera Selatan	0,284329	0,280711	0,348474	-1,134307	14,38431
7	Bengkulu	0,530985	0,200573	0,041957	-1,667703	16,06302
8	Lampung	0,390183	0,493901	-0,018876	-1,845774	12,71496
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,247155	1,022530	0,050540	-0,348841	24,31295
10	Kepulauan Riau	0,565612	-0,504652	0,728984	1,532727	35,08101
11	DKI Jakarta	0,511404	0,184513	4,774715	0,446625	93,70890
12	Jawa Barat	0,568622	0,754257	0,841285	-1,067994	40,62524
13	Jawa Tengah	-0,331603	2,046064	-0,389776	-0,047975	11,11681

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW				Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	
14	DI Yogyakarta	-0,325334	1,607022	-0,594657	2,043036	14,00377
15	Jawa Timur	-0,132259	0,971840	-0,591805	0,010575	0,81165
16	Banten	0,701467	-0,003545	1,004147	-0,698301	39,21942
17	Bali	-1,101197	2,574943	-0,248853	1,875003	0,10039
18	Nusa Tenggara Barat	-0,039606	0,239111	-0,925036	-0,336177	-13,00119
19	Nusa Tenggara Timur	-1,140153	0,434992	-0,621874	-0,797882	-54,29265
20	Kalimantan Barat	-0,478943	-0,155699	-0,374834	-0,364875	-29,64786
21	Kalimantan Tengah	0,285110	-0,678482	-0,425445	-0,277167	-5,88036
22	Kalimantan Selatan	0,322640	0,861142	-0,364464	-0,891645	16,06905
23	Kalimantan Timur	0,349966	-0,191693	0,854148	1,683927	33,42726
24	Kalimantan Utara	-0,098205	-0,110708	-0,294688	1,773252	0,36173
25	Sulawesi Utara	0,885696	-0,501667	-0,557445	0,479439	24,29301
26	Sulawesi Tengah	-0,023744	-0,344700	-0,570988	-0,266972	-15,72000
27	Sulawesi Selatan	0,028242	-0,032523	-0,458444	0,629972	-2,11033
28	Sulawesi Tenggara	-0,089365	-0,617661	-0,619765	0,695082	-17,66868
29	Gorontalo	0,009005	0,442871	-0,846246	-0,475964	-7,62386
30	Sulawesi Barat	-0,343025	-0,615634	-0,462309	-0,850456	-34,92011
31	Maluku	0,358671	-2,143382	-0,465335	0,749030	-19,40856
32	Maluku Utara	0,585106	-1,999730	-0,542464	0,452754	-10,62389
33	Papua Barat	-0,512290	-1,501402	-0,505688	1,109319	-44,52821
34	Papua	-4,906222	-1,247782	1,076421	-0,833330	-212,6587

Hasil skor faktor pada setiap faktor dan indeks komposit kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu TPW rendah, TPW sedang, dan TPW tinggi. Klasifikasi ini dilakukan dengan metode *natural break*. Pada faktor 1, TPW tertinggi adalah Aceh dan yang terendah adalah Papua. Aceh memiliki prioritas pembangunan pendidikan yang tercermin dari meningkatnya anggaran pendidikan di wilayah tersebut pada masa reformasi [21]. Di sisi lain menurut Kahar dkk. [22] Papua memiliki banyak masyarakat yang buta huruf sehingga aktivitas penduduknya terganggu. Kedua hal ini mencerminkan bahwa Aceh cukup melakukan pembangunan pada aspek manusia, sedangkan Papua belum melakukannya.

Pada faktor 2, TPW tertinggi adalah Bali sedangkan yang terendah adalah Maluku. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena Bali memiliki nilai angka harapan hidup yang cukup tinggi. Hal ini berbeda dengan Maluku yang memiliki nilai AHP cukup rendah. Pada faktor 3, TPW tertinggi adalah DKI Jakarta dan yang terendah NTB. Nilai PDRB per kapita menjadi salah satu variabel penyusun faktor kesejahteraan rakyat. DKI Jakarta memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi di Indonesia, sedangkan PDRB per kapita di NTB cukup rendah. Pada faktor 4, TPW tertinggi adalah DI Yogyakarta, sedangkan yang terendah adalah Lampung. Salah satu variabel pembentuk faktor ini adalah persentase rumah tangga menguasai komputer dimana DI Yogyakarta memiliki nilai yang cukup tinggi. Hal ini berbeda dengan Lampung yang memiliki

persentase terendah di Indonesia. Jika dilihat dari nilai indeks kompositnya, nilai paling tinggi didapatkan oleh DKI Jakarta, sedangkan Papua menjadi yang paling rendah. Nilai ini memberikan arti bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat perkembangan yang paling tinggi di Indonesia, sedangkan Papua menjadi yang paling rendah.

Di tahun 2019, iterasi dilakukan sebanyak lima kali untuk memenuhi syarat analisis faktor. Setelah iterasi kelima, didapatkan 5 faktor baru, yaitu faktor 1 (pembangunan manusia), faktor 2 (kesejahteraan rakyat), faktor 3 (pembangunan sosial), faktor 4 (kesehatan balita), dan faktor 5 (kesehatan dan TIK). Skor faktor dan indeks komposit tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2019 adalah seperti pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Klasifikasi tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2019.

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW					Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	
1	Aceh	0,913728	0,149927	-0,77430	-1,574721	-0,506252	18,03833
2	Sumatera Utara	0,392364	-0,046015	0,294437	-0,910420	0,007689	14,42195
3	Sumatera Barat	0,294715	-0,429460	0,804940	-1,003047	0,127077	11,29892
4	Riau	0,449849	0,382429	0,132345	-1,433006	0,501817	21,26260
5	Jambi	0,386861	-0,404568	-0,08763	-0,873084	0,774508	7,25791
6	Sumatera Selatan	0,173327	0,006249	0,386892	-1,296551	-0,738232	1,74101
7	Bengkulu	0,034934	-0,844928	0,480023	-0,360043	0,312023	-6,10355
8	Lampung	0,130898	-0,462604	0,321897	-0,534502	-1,083733	-6,21035
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,099218	-0,459418	1,640941	-0,853802	-0,183654	13,49281
10	Kepulauan Riau	0,535585	0,700159	0,072637	0,497700	1,692556	45,52181
11	DKI Jakarta	0,270983	5,010627	0,043913	0,189351	-0,150469	93,49372
12	Jawa Barat	0,291948	0,591001	0,913617	-1,350936	-0,905120	22,15248
13	Jawa Tengah	-0,19268	-0,183718	1,590084	0,623963	-1,323638	7,46569
14	DI Yogyakarta	-0,04504	0,081827	1,049969	2,750249	0,653896	31,89806
15	Jawa Timur	0,003268	-0,064291	0,038767	1,096999	-1,098126	-0,14640
16	Banten	0,627801	0,843377	0,175518	-1,362157	-0,746902	30,58954
17	Bali	-0,42896	-0,286638	2,804390	1,362102	0,484103	25,97709
18	Nusa Tenggara Barat	-0,09640	0,111312	-1,17753	1,352685	-2,761052	-25,12336

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW					Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	
19	Nusa Tenggara Timur	-0,91326	-0,130920	-0,76327	0,692590	-1,761844	-55,06113
20	Kalimantan Barat	-0,35818	-0,649632	0,022663	-0,386728	0,092898	-26,44066
21	Kalimantan Tengah	0,191944	-0,913324	-0,28605	-0,296029	1,014720	-7,36371
22	Kalimantan Selatan	0,119571	-0,935701	0,799853	-0,333350	-0,018354	-1,31279
23	Kalimantan Timur	0,366931	0,671661	0,646054	0,576385	1,967144	47,86104
24	Kalimantan Utara	0,311353	-0,016197	-0,15155	1,008062	1,255061	22,14677
25	Sulawesi Utara	0,818673	-0,473161	-0,45320	0,382660	0,527280	24,15846
26	Sulawesi Tengah	0,242366	-0,392887	-0,88633	0,279142	-0,233997	-8,36324
27	Sulawesi Selatan	0,327729	-0,284647	-0,07267	0,502523	-0,047217	10,15058
28	Sulawesi Tenggara	0,121392	-0,394593	-0,51930	0,958745	0,433252	-1,24875
29	Gorontalo	0,121951	-0,454101	-0,39207	0,791144	-1,318500	-10,31989
30	Sulawesi Barat	-0,44744	-0,836444	-0,74703	-0,014611	-0,041170	-42,34072
31	Maluku	0,382482	0,111014	-2,39575	0,213817	0,700846	-10,65589
32	Maluku Utara	0,608994	-0,485550	-1,58300	-0,515644	1,174279	-1,51335
33	Papua Barat	-0,50653	0,075912	-1,62750	0,835487	0,401962	-35,11385
34	Papua	-5,23039	0,413304	-0,30176	-1,014972	0,797148	-211,61114

Berdasarkan hasil tersebut, pada faktor 1 TPW tertinggi adalah Aceh dan yang terendah adalah Papua. Kondisi ini sama dengan kondisi di tahun 2018 untuk faktor 1. Pada faktor 2, TPW tertinggi adalah DKI Jakarta dan TPW terendah adalah Kalimantan Selatan. Kondisi ini sama seperti tahun 2018 di faktor 3 untuk DKI Jakarta. Akan tetapi, terjadi perbedaan untuk TPW terendah, yaitu menjadi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena salah satu variabel penyusunnya, yaitu rasio murid SD terhadap jumlah sekolah dasar memiliki nilai yang cukup rendah.

Pada faktor 3, TPW tertinggi adalah Bali dan yang terendah adalah Maluku. Kondisi ini sama dengan tahun 2018 untuk faktor 2. Pada faktor 4, TPW tertinggi adalah DI Yogyakarta dan yang

terendah adalah Aceh. Tinggi rendahnya TPW ini dipengaruhi oleh nilai persentase balita mendapat imunisasi lengkap dimana DI Yogyakarta memiliki persentase yang tinggi, sedangkan persentase di Aceh cukup rendah. Pada faktor 5, TPW tertinggi adalah Kalimantan Timur dan yang terendah adalah NTB. Hal ini salah satunya disebabkan karena variabel penyusunnya, yaitu persentase rumah tangga yang menguasai komputer bernilai rendah di NTB, sedangkan Kalimantan Timur memiliki persentase yang tinggi. Jika dilihat dari nilai indeks kompositnya, DKI Jakarta masih menjadi yang paling tinggi dan Papua menjadi yang paling rendah. Kondisi ini sama seperti indeks komposit tahun 2018.

Di tahun 2020, iterasi dilakukan sebanyak lima kali untuk memenuhi syarat analisis faktor. Setelah iterasi kelima, didapatkan 5 faktor baru, yaitu faktor 1 (pembangunan berkelanjutan), faktor 2 (kesejahteraan rakyat), faktor 3 (pembangunan manusia), faktor 4 (kesehatan dan demografi), dan faktor 5 (kesehatan dan infrastruktur). Skor faktor dan indeks komposit tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2020 adalah seperti pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Klasifikasi tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2020.

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW					Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	
1	Aceh	0,882969	0,081850	-1,09596	0,278942	-1,227747	20,45930
2	Sumatera Utara	0,722756	0,024383	-0,11575	0,100037	-0,916386	25,44290
3	Sumatera Barat	0,514736	-0,162705	0,412890	0,256355	-1,138953	20,13179
4	Riau	0,771045	0,515680	-0,01641	-0,539252	-1,172027	30,91116
5	Jambi	0,711888	-0,204894	-0,25804	-0,430174	-1,025398	16,23687
6	Sumatera Selatan	0,169055	-0,028921	0,096521	0,640056	-1,287533	5,00077
7	Bengkulu	0,190170	-0,508621	-0,02553	0,136077	-0,092141	0,59471
8	Lampung	0,126797	-0,551453	0,204583	0,678279	-0,850769	-0,66409
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,355542	-0,465227	1,485596	0,012842	-0,971680	21,58152
10	Kepulauan Riau	0,803356	0,687492	0,592862	-1,760960	0,484702	43,76370
11	DKI Jakarta	-0,03141	5,032906	-0,22096	1,157823	0,334551	78,27602
12	Jawa Barat	0,119326	0,464776	0,743870	0,826484	-1,090801	20,19316
13	Jawa Tengah	-0,39782	-0,500154	1,529143	1,259634	0,491456	4,40645
14	DI Yogyakarta	0,011850	0,499622	0,712561	0,656394	2,592522	33,75455
15	Jawa Timur	-0,10646	-0,326788	0,032417	1,163643	0,753875	1,70077

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW					Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	
16	Banten	0,403938	0,641152	0,237832	0,623872	-1,113897	27,33957
17	Bali	-0,06774	-0,395708	3,454116	-0,722264	1,329786	36,46147
18	Nusa Tenggara Barat	-0,68909	-0,610477	-1,11015	2,380087	1,238353	-31,68889
19	Nusa Tenggara Timur	-1,33544	-0,608381	-0,33549	1,079427	0,646926	-60,11463
20	Kalimantan Barat	-0,37922	-0,680722	0,329233	-0,363813	-0,455564	-26,48093
21	Kalimantan Tengah	0,388090	-0,498691	-0,35219	-0,786337	-0,449274	-2,05878
22	Kalimantan Selatan	0,350294	-0,690713	0,501225	0,478507	-0,702478	10,02488
23	Kalimantan Timur	0,794576	0,772344	0,885865	-1,847418	0,399318	47,30003
24	Kalimantan Utara	0,317804	0,208855	0,036150	-1,372291	0,722991	12,77492
25	Sulawesi Utara	0,821286	-0,488872	-0,39138	-0,402778	0,537523	23,27734
26	Sulawesi Tengah	0,112646	-0,101383	-1,45927	0,439759	0,012319	-12,04728
27	Sulawesi Selatan	0,012041	-0,376204	0,055774	0,321626	0,619785	0,72599
28	Sulawesi Tenggara	0,101313	-0,295581	-0,57210	0,020006	0,999237	-1,81460
29	Gorontalo	-0,25410	-0,734119	-0,36206	1,088912	0,622193	-16,50239
30	Sulawesi Barat	-0,47613	-0,800697	-0,38723	-0,058080	-0,584351	-40,05729
31	Maluku	0,025113	-0,070639	-1,69402	-1,155334	1,427008	-20,13361
32	Maluku Utara	0,642276	-0,128871	-2,09510	-1,066801	0,006151	-6,55585
33	Papua Barat	-0,73543	-0,290119	-0,85549	-1,725233	1,259825	-49,45692
34	Papua	-4,87605	0,590880	0,036479	-1,368025	-1,399518	-212,78265

Berdasarkan hasil pada tabel, terlihat pada faktor 1 TPW tertinggi adalah Aceh dan terendah adalah Papua. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh persentase rumah tangga dengan penerangan listrik yang menjadi variabel penyusun faktor dimana Aceh memiliki persentase tinggi. Selain itu, faktor ini juga dipengaruhi oleh akses sanitasi layak dan angka melek huruf dimana Papua memiliki persentase yang rendah. Pada faktor 2, TPW tertinggi masih tetap ada

pada DKI Jakarta seperti tahun 2019 di faktor 2. Akan tetapi, TPW terendah berubah menjadi Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk dan rata-rata lama sekolah yang cukup rendah di provinsi ini.

Pada faktor 3, Bali masih menjadi wilayah dengan TPW tertinggi seperti tahun 2019 di faktor 1. Kondisi yang berbeda terlihat pada wilayah dengan TPW terendah yang berubah menjadi Maluku. Hal ini salah satunya disebabkan oleh angka harapan hidup yang menjadi variabel penyusun faktor dimana AHP Bali cukup tinggi sedangkan di Maluku cukup rendah. Pada faktor 4, TPW tertinggi adalah NTB dan TPW terendah adalah Kalimantan Timur. Aspek kesehatan dan demografi di tahun 2020 pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Pada faktor 5, TPW tertinggi adalah DI Yogyakarta dan yang terendah adalah Papua. Tinggi rendahnya TPW faktor ini disebabkan oleh persentase balita mendapat imunisasi lengkap dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak. Kedua variabel ini memiliki persentase tinggi di DI Yogyakarta, namun cukup rendah untuk Papua. Jika dilihat dari nilai indeks kompositnya, nilai paling tinggi adalah DKI Jakarta dan yang paling rendah adalah Papua. Kondisi ini sama seperti indeks komposit tahun 2018 dan 2019.

Di tahun 2021, iterasi dilakukan sebanyak enam kali untuk memenuhi syarat analisis faktor. Setelah dilakukan enam kali iterasi, didapatkan 5 faktor baru, yaitu faktor 1 (pembangunan manusia), faktor 2 (kesejahteraan rakyat), faktor 3 (pembangunan berkelanjutan), faktor 4 (pembangunan sosial), dan faktor 5 (kesehatan penduduk). Skor faktor dan indeks komposit tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2021 adalah seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2021.

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW					Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	
1	Aceh	0,625802	-0,190830	0,208076	-0,961749	-0,283832	17,84407
2	Sumatera Utara	0,502251	-0,338579	0,023382	0,248005	0,613757	20,22988
3	Sumatera Barat	0,008562	-0,489306	0,451026	0,651361	0,447561	4,64908
4	Riau	-0,17650	0,217347	0,960196	-0,125478	0,365327	9,73583
5	Jambi	-0,26265	-0,447391	0,821718	-0,142997	0,727368	-4,45693
6	Sumatera Selatan	-0,15998	-0,187929	0,068768	0,249157	-0,542554	-10,03710
7	Bengkulu	0,052915	-0,694360	0,102764	0,299764	0,006342	-5,79728
8	Lampung	-0,16564	-0,506699	0,305039	0,124419	-0,916454	-15,10989
9	Kepulauan Bangka Belitung	-1,00514	-0,403435	1,541129	1,064304	-0,410135	-23,55494
10	Kepulauan Riau	0,565501	0,526017	0,440515	0,539889	1,835785	50,34221

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW					Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	
11	DKI Jakarta	0,396498	5,224682	0,064139	-0,258192	-0,421983	97,28135
12	Jawa Barat	-0,30931	0,365878	0,623950	0,526023	-0,712113	0,67562
13	Jawa Tengah	0,062483	-0,345139	-0,15095	1,783351	-1,025143	0,63639
14	DI Yogyakarta	1,209518	0,426188	-0,89041	1,609714	0,347171	56,78910
15	Jawa Timur	0,343966	-0,063628	-0,35512	0,128348	-1,054254	3,74185
16	Banten	-0,06388	0,597907	0,772658	-0,227871	-0,800506	11,27083
17	Bali	1,213638	-0,335557	-1,00102	3,275769	0,751140	55,68741
18	Nusa Tenggara Barat	0,751625	-0,035086	-1,19068	-1,080962	-3,053738	-7,82507
19	Nusa Tenggara Timur	0,452954	-0,509232	-2,05333	0,066728	-0,523861	-18,31703
20	Kalimantan Barat	-0,92726	-0,585967	0,447611	0,097486	-0,047294	-41,36174
21	Kalimantan Tengah	-0,29737	-0,660492	0,483009	-0,533984	0,792914	-15,71488
22	Kalimantan Selatan	-0,34773	-0,591058	0,745829	0,179782	-0,730586	-16,95506
23	Kalimantan Timur	0,050417	0,645796	1,081803	0,763700	1,408601	38,48869
24	Kalimantan Utara	-0,29571	0,169207	0,881164	-0,091596	0,327137	3,06499
25	Sulawesi Utara	0,348950	-0,294261	1,038050	-0,789519	0,438143	20,35487
26	Sulawesi Tengah	-0,45027	-0,130334	0,326027	-1,020566	-0,084220	-23,11220
27	Sulawesi Selatan	-0,08562	-0,089429	0,554835	-0,177056	-0,797583	-3,14063
28	Sulawesi Tenggara	0,447054	-0,300194	-0,21823	-0,385352	0,006270	8,36865
29	Gorontalo	0,384753	-0,372667	-0,27545	-0,605470	-1,136153	-3,48545
30	Sulawesi Barat	-0,28937	-0,491923	-0,54359	-0,895716	-0,649987	-35,70913
31	Maluku	1,654480	-0,128466	-1,60926	-1,844798	2,051221	44,63472
32	Maluku Utara	-0,66056	-0,233429	1,060565	-1,940336	1,207486	-22,80225
33	Papua Barat	0,978715	-0,333072	-2,01346	-0,826865	1,048082	9,40389

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW					Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	
34	Papua	-4,55310	0,585440	-2,70077	0,300710	0,816090	-205,81985

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, pada faktor 1 diketahui bahwa TPW tertinggi adalah Maluku dan yang terendah adalah Papua. Faktor ini salah satunya disusun oleh variabel angka partisipasi sekolah dimana di Maluku nilai ini cukup tinggi. Pada faktor 2, TPW tertinggi adalah DKI Jakarta, sama seperti tahun 2020 di faktor 2. Akan tetapi, TPW terendah berubah menjadi Bengkulu. Hal ini disebabkan oleh cukup rendahnya rata-rata lama sekolah, yang menjadi salah satu variabel penyusun faktor, di provinsi ini.

Pada faktor 3, TPW terendah adalah Papua, sama seperti tahun 2020 di faktor 1. Kondisi berbeda terlihat pada wilayah dengan TPW tertinggi yang berubah menjadi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini karena salah satunya disebabkan oleh tingginya persentase penduduk tidak miskin. Pada faktor 4, TPW tertinggi adalah Bali, sama seperti tahun 2019 di faktor 3. Akan tetapi, TPW terendah berubah menjadi Maluku Utara karena tingkat pendidikannya yang cukup rendah. Pada faktor 5, TPW tertinggi adalah Maluku dan yang terendah adalah NTB. Kondisi ini berkaitan dengan tinggi rendahnya persentase penduduk tanpa keluhan kesehatan yang menjadi variabel penyusun faktor. Jika dilihat dari nilai indeks kompositnya, DKI Jakarta masih tetap menjadi provinsi dengan nilai paling tinggi dan Papua menjadi yang paling rendah. Kondisi ini sama seperti indeks komposit tahun 2018, 2019, dan 2020.

Di tahun 2022, iterasi dilakukan sebanyak tujuh kali untuk memenuhi syarat analisis faktor. Setelah dilakukan tujuh kali iterasi, didapatkan 4 faktor baru, yaitu faktor 1 (pembangunan manusia), faktor 2 (kesejahteraan rakyat), faktor 3 (kesehatan dan ekonomi), dan faktor 4 (pendidikan dan ketenagakerjaan). Skor faktor dan indeks komposit tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2022 terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Klasifikasi tingkat perkembangan wilayah di Indonesia tahun 2022.

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW				Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	
1	Aceh	0,447757	-0,414697	0,218683	-0,880324	9,17923
2	Sumatera Utara	0,564804	-0,246946	-0,025748	0,221762	19,92832
3	Sumatera Barat	0,220697	-0,149243	0,153982	0,307323	10,29041
4	Riau	0,096247	0,590543	0,622803	-0,974992	17,90198
5	Jambi	-0,099629	-0,056243	0,445914	-0,854034	-3,84922
6	Sumatera Selatan	-0,186614	-0,199574	0,489473	0,115884	-4,10790
7	Bengkulu	0,014759	-0,379347	0,074474	-0,033316	-5,49453
8	Lampung	-0,294177	-0,494823	0,884598	-0,132379	-9,98386
9	Kepulauan Bangka Belitung	-0,490928	0,070212	1,767275	-0,005296	4,91034
10	Kepulauan Riau	0,752732	1,023709	-0,519598	0,132814	43,78193
11	DKI Jakarta	0,313860	4,652551	-0,339988	0,032464	93,77369

No.	Provinsi	Klasifikasi TPW				Komposit
		Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	
12	Jawa Barat	0,038798	0,396246	0,533347	0,359577	18,15588
13	Jawa Tengah	-0,004319	-0,475401	1,050130	1,837350	15,68933
14	DI Yogyakarta	0,957076	0,176000	0,101461	2,122903	56,35377
15	Jawa Timur	0,071256	-0,474932	0,458184	0,634479	4,07108
16	Banten	0,413410	0,593326	-0,185343	-0,234670	24,26856
17	Bali	0,997587	0,119692	-0,504003	3,586425	56,89009
18	Nusa Tenggara Barat	-0,224896	-1,231636	0,782448	0,149187	-20,40500
19	Nusa Tenggara Timur	-0,324488	-1,083205	-0,975679	1,173887	-40,15292
20	Kalimantan Barat	-0,764926	-0,317542	0,455298	-0,456648	-34,04850
21	Kalimantan Tengah	-0,289519	-0,140077	0,031713	-1,307520	-21,48723
22	Kalimantan Selatan	-0,269066	-0,265981	0,957607	-0,688441	-6,84628
23	Kalimantan Timur	0,267950	1,436128	0,753506	-0,537083	44,76255
24	Kalimantan Utara	0,061078	0,530628	0,820076	-0,601155	20,11336
25	Sulawesi Utara	0,803329	-0,162774	-0,193594	-0,994845	22,35631
26	Sulawesi Tengah	-0,084575	-0,337869	-0,532450	-0,597827	-20,31136
27	Sulawesi Selatan	-0,060195	-0,209043	0,921431	-0,180363	5,24406
28	Sulawesi Tenggara	0,366614	-0,485985	0,065458	-0,239794	5,96166
29	Gorontalo	0,000418	-0,936191	0,346270	0,014195	-12,30649
30	Sulawesi Barat	-0,882047	-0,803781	0,090282	-0,552892	-53,35427
31	Maluku	1,517276	-0,581258	-3,192540	-0,505945	6,24694
32	Maluku Utara	0,816435	-0,364072	-1,557406	-1,419355	-1,77041
33	Papua Barat	0,128715	-0,434975	-2,181453	-0,211278	-33,56005
34	Papua	-4,875419	0,656559	-1,816609	0,719905	-212,2015

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa faktor 1, TPW tertinggi adalah Maluku dan yang terendah adalah Papua. Kondisi ini sama dengan kondisi di tahun 2021 di faktor 1. Pada faktor 2, TPW tertinggi adalah DKI Jakarta dan TPW terendah adalah NTB. Kondisi ini sama seperti pada faktor 3 di tahun 2018. Pada faktor 3, TPW tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung dan yang terendah adalah Maluku. Faktor ini disusun oleh variabel seperti AHP dan penduduk tidak miskin. Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai yang cukup tinggi pada kedua variabel tersebut, sedangkan Provinsi Maluku memiliki nilai yang cukup rendah.

Pada faktor 4, TPW tertinggi adalah Bali, sedangkan yang terendah adalah Maluku Utara. Kondisi ini disebabkan salah satunya oleh partisipasi angkatan kerja yang menjadi variabel penyusun faktor. Nilai yang cukup rendah didapatkan Maluku Utara pada variabel tersebut, sedangkan nilai yang cukup tinggi ada di Bali. Jika dilihat dari nilai indeks kompositnya, DKI Jakarta tetap menjadi yang paling tinggi dan Papua yang paling rendah. Kondisi ini sama seperti indeks komposit tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.

3.2. Ketimpangan wilayah

Ketimpangan wilayah di setiap provinsi di Indonesia dianalisis dengan metode indeks Williamson. Penelitian ini memanfaatkan data pada lebel kabupaten/kota. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai indeks Williamson di Indonesia dapat terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Klasifikasi ketimpangan di Indonesia.

No.	Provinsi	Nilai Indeks Williamson				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	0,3329	0,384117	0,40106	0,41491	0,4222
2	Sumatera Utara	0,570496	0,575696	0,563866	0,556469	0,560322
3	Sumatera Barat	0,26378	0,266552	0,302049	0,305214	0,307571
4	Riau	0,35025	0,3302	0,29651	0,28349	0,27469
5	Jambi	0,4682	0,469637	0,465657	0,447603	0,42959
6	Sumatera Selatan	0,71462	0,717531	0,7347	0,738167	0,7435
7	Bengkulu	0,404186	0,40241	0,42234	0,530087	0,435027
8	Lampung	0,263595	0,26448	0,238238	0,237937	0,237799
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,199087	0,214001	0,200026	0,186174	0,179225
10	Kepulauan Riau	0,464282	0,45107	0,407942	0,398415	0,382855
11	DKI Jakarta	0,512225	0,50218	0,491636	0,48389	0,482348
12	Jawa Barat	0,69974	0,690528	0,673452	0,732869	0,736041
13	Jawa Tengah	0,637919	0,631343	0,656588	0,654678	0,65295
14	DI Yogyakarta	0,476574	0,471533	0,514738	0,517324	0,518563
15	Jawa Timur	0,965956	0,971443	0,974904	0,982046	0,993946
16	Banten	0,628312	0,627486	0,629866	0,634231	0,632828
17	Bali	0,269746	0,264986	0,364944	0,349705	0,384109
18	Nusa Tenggara Barat	0,596362	0,569924	0,718978	0,70618	0,784263
19	Nusa Tenggara Timur	0,663536	0,665823	0,646606	0,6273	0,623596
20	Kalimantan Barat	0,269697	0,268837	0,276053	0,278735	0,280889
21	Kalimantan Tengah	0,191994	0,188877	0,21597	0,217994	0,221096
22	Kalimantan Selatan	0,442282	0,435075	0,434225	0,433869	0,434293
23	Kalimantan Timur	0,4608	0,47998	0,462659	0,447629	0,438316
24	Kalimantan Utara	0,157665	0,14135	0,170598	0,168789	0,163219
25	Sulawesi Utara	0,502768	0,502642	0,489289	0,497754	0,502095
26	Sulawesi Tengah	0,801656	1,000727	1,110439	1,236046	1,357171
27	Sulawesi Selatan	0,69192	0,707984	0,772492	0,770402	0,77557
28	Sulawesi Tenggara	0,452254	0,452853	0,485654	0,489142	0,473092
29	Gorontalo	0,14608	0,143698	0,191344	0,193609	0,194818
30	Sulawesi Barat	0,351085	0,342356	0,330575	0,33292	0,320429
31	Maluku	0,25079	0,242603	0,433692	0,442895	0,448508
32	Maluku Utara	0,275768	0,28044	0,355941	0,582182	0,927956

No.	Provinsi	Nilai Indeks Williamson				
		2018	2019	2020	2021	2022
33	Papua Barat	1,471063	1,463883	1,490991	1,449017	1,43148
34	Papua	0,838521	0,849508	0,810063	0,8178	0,819562
	Indonesia	0,706814	0,715411	0,715184	0,71422	0,714078

Analisis tingkat ketimpangan wilayah dengan metode indeks Williamson dilakukan untuk tahun 2018 hingga 2022. Secara umum, Indonesia masuk dalam kalsifikasi tinggi selama lima tahun tersebut. Jika dilihat secara lebih detail, setiap provinsi di Indonesia memiliki nilai ketimpangan yang berbeda-beda. Papua Barat di tahun 2018 – 2022 dan Sulawesi Tengah di tahun 2019 – 2022 memiliki nilai indeks Williamson yang lebih dari 1 sehingga melampaui ambang batas maksimal. Jika mengecualikan nilai-nilai tersebut, ketimpangan tertinggi di tahun 2018 hingga 2022 ada di Jawa Timur. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di Jawa Timur.

Menurut Nurcahyo [23] ketimpangan akan semakin meningkat ketika terjadi aglomerasi yang tinggi. Aglomerasi ekonomi di Jawa Timur terjadi di kawasan Gerbangkertosusilo. Kondisi yang berbeda ada di Gorontalo yang menjadi provinsi dengan ketimpangan paling rendah di tahun 2018. Akan tetapi, di tahun 2019 hingga 2022, ketimpangan terendah ada di Kalimantan Utara. Pendapatan per kapita di Kalimantan Utara telah melebihi rata-rata nasional, meskipun ekonominya mengalami pertumbuhan yang tergolong rendah [24]. Selain itu, menurut Faqihuddin dkk. [25] sektor unggulan di provinsi ini salah satunya adalah sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian yang tinggi akan menurunkan ketimpangan yang ada [26].

3.3. Hubungan tingkat perkembangan wilayah dengan ketimpangan wilayah

Hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan ketimpangan wilayah di Indonesia dianalisis dengan analisis korelasi *rank spearman*. Analisis ini dilakukan di tahun 2018 hingga 2022 untuk setiap faktor tingkat perkembangan wilayah dan indeks kompositnya. Hasil dari analisis korelasi terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Nilai signifikansi IW dan TPW.

	Nilai Indeks Williamson				
	2018	2019	2020	2021	2022
TPW Faktor 1	0,316	0,582	0,055	0,686	0,253
TPW Faktor 2	0,353	0,032	0,550	0,642	0,796
TPW Faktor 3	0,030	0,776	0,688	0,517	0,336
TPW Faktor 4	0,511	0,804	0,034	0,353	0,031
TPW Faktor 5		0,030	0,181	0,177	
TPW Indeks Komposit	0,605	0,561	0,514	0,478	0,742

Berdasarkan hasil analisis korelasi *rank spearman* yang telah dilakukan, korelasi signifikan terjadi antara TPW faktor 3, yaitu kesejahteraan rakyat dengan ketimpangan wilayah di tahun 2018. Koefisien korelasi yang dihasilkan pada analisis ini sebesar 0,378 yang berarti terjadi

korelasi positif dengan tingkat hubungan lemah. Di tahun 2019, terjadi korelasi signifikan antara TPW faktor 2, yaitu kesejahteraan rakyat; serta faktor 5, yaitu kesehatan dan TIK, dengan ketimpangan wilayah. Korelasi antara ketimpangan wilayah dengan TPW faktor 2 menghasilkan nilai koefisien korelasi 0,379 yang berarti korelasi terjadi positif dengan tingkat hubungan lemah. Korelasi ketimpangan dengan TPW 5 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar -0,385 yang berarti terjadi korelasi negatif dengan tingkat hubungan lemah.

Menurut Murty & Shankar [27], konsep *smart village* harus mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi. Hal ini karena proyek *smart village* menjadi suatu upaya interdisipliner yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan global dengan model yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan setiap potensi yang ada di suatu desa, konsep *smart village* akan mampu untuk mengatasi kemiskinan yang kemudian berdampak pada berkurangnya ketimpangan. Korelasi juga terjadi di tahun 2020, yaitu antara TPW faktor 4, yaitu kesehatan dan demografi, dengan ketimpangan wilayah. Koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0,376 yang berarti bahwa terjadi korelasi positif dengan tingkat hubungan lemah.

Kondisi berbeda terlihat di tahun 2021 dimana tidak ada satu pun TPW yang berkorelasi dengan ketimpangan wilayah. Di tahun 2022, korelasi kembali terjadi, yaitu pada ketimpangan wilayah dengan TPW faktor 4, yaitu pendidikan dan ketenagakerjaan. Korelasi ini memiliki koefisien korelasi sebesar 0,382 yang berarti korelasi terjadi secara positif dengan tingkat hubungan lemah. Pada penelitian sebelumnya juga disebutkan bahwa terjadi korelasi antara tingkat pendidikan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Menurut Sun dkk. [28], tingkat pendidikan memiliki dampak yang besar pada kualitas pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Peta hubungan TPW faktor kesejahteraan rakyat dan tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2018.

Hasil analisis korelasi kemudian menjadi dasar untuk klasifikasi tipologi wilayah, seperti terlihat pada Gambar 1-5. Ada 4 tipologi yang dibuat, yaitu 1 (TPW tinggi dan ketimpangan tinggi); 2 (TPW rendah dan ketimpangan tinggi); 3 (TPW rendah dan ketimpangan rendah); serta 4 (TPW tinggi dan ketimpangan rendah). Korelasi antara TPW faktor 3 dan ketimpangan wilayah di tahun 2018 menghasilkan 6 provinsi masuk tipologi 1, 7 provinsi di tipologi 2, 13 provinsi di tipologi 3, dan 7 provinsi di tipologi 4. Berdasarkan peta yang telah disusun, Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi didominasi oleh TPW rendah dan ketimpangan tinggi. Pulau Kalimantan didominasi oleh TPW rendah dan ketimpangan rendah, Pulau Papua didominasi oleh TPW tinggi dan ketimpangan tinggi, serta Pulau Sumatera didominasi oleh TPW rendah dan ketimpangan tinggi.



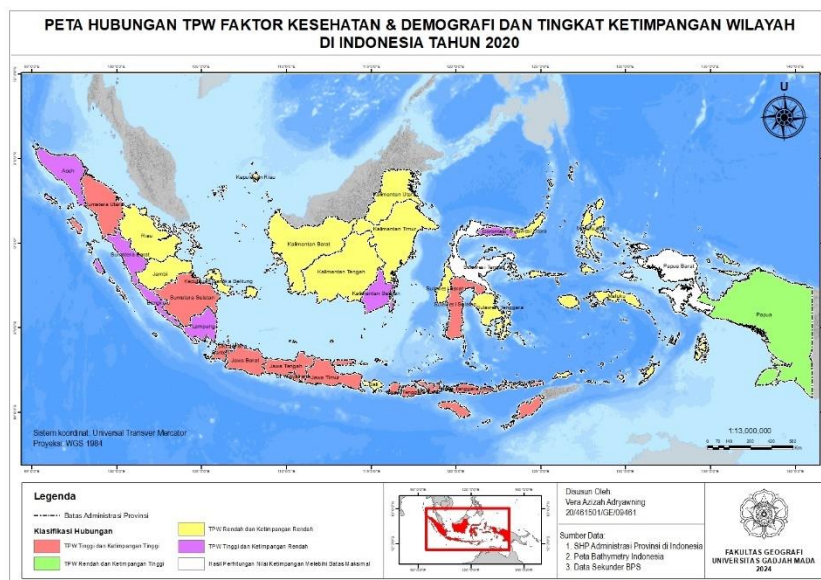
Gambar 2. Peta hubungan TPW faktor kesejahteraan rakyat dan tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2019.

Korelasi antara TPW faktor 2 dan ketimpangan wilayah di tahun 2019 menghasilkan 5 provinsi masuk tipologi 1, 7 provinsi di tipologi 2, 14 provinsi di tipologi 3, dan 6 provinsi di tipologi 4. Berdasarkan peta yang telah disusun, TPW tinggi dan ketimpangan rendah ada di seluruh pulau, kecuali Pulau Bali dan Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan didominasi oleh TPW rendah dan ketimpangan rendah. Pulau Bali, Pulau Papua, dan Pulau Jawa masuk dalam tipologi TPW tinggi dan ketimpangan tinggi.



Gambar 3. Peta hubungan TPW faktor kesehatan & TIK dan tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2019.

Korelasi antara TPW faktor 5 dan ketimpangan wilayah di tahun 2019 menghasilkan 3 provinsi masuk tipologi 1, 9 provinsi di tipologi 2, 6 provinsi di tipologi 3, dan 14 provinsi di tipologi 4. Berdasarkan peta yang telah disusun, terlihat bahwa Pulau Jawa didominasi oleh TPW rendah dan ketimpangan tinggi. Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan didominasi oleh TPW tinggi dan ketimpangan rendah. Pulau Papua memiliki tipologi TPW tinggi dan ketimpangan tinggi. Pulau Sulawesi memiliki tipologi yang cukup beragam, sama seperti Pulau Sumatera.



Gambar 4. Peta hubungan TPW faktor kesehatan & demografi dan tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2020.

Korelasi antara TPW faktor 4 dan ketimpangan wilayah di tahun 2020 menghasilkan 1 provinsi masuk tipologi 1, 1 provinsi di tipologi 2, 14 provinsi di tipologi 3, dan 7 provinsi di tipologi 4. Berdasarkan peta yang telah disusun, Pulau Jawa-Bali terlihat didominasi oleh TPW tinggi dan ketimpangan tinggi. Kondisi berbeda terlihat di Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang didominasi oleh TPW rendah dan ketimpangan rendah, serta Pulau Papua yang memiliki tipologi TPW rendah dan ketimpangan tinggi yang juga hanya berada di pulau tersebut. Pulau Sumatera memiliki 3 tipologi, kecuali TPW rendah dan ketimpangan tinggi.



Gambar 5. Peta hubungan TPW faktor pendidikan & kesehatan dan tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2022.

Korelasi antara TPW faktor 4 dan ketimpangan wilayah di tahun 2022 menghasilkan 9 provinsi masuk tipologi 1, 4 provinsi di tipologi 2, 15 provinsi di tipologi 3, dan 4 provinsi di tipologi 4. Berdasarkan peta yang telah disusun, TPW tinggi dan ketimpangan rendah ada di Pulau Bali dan Sumatera. TPW rendah dan ketimpangan tinggi ada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau Jawa dan Bali didominasi oleh TPW tinggi dan ketimpangan tinggi. Pulau Kalimantan didominasi oleh TPW rendah dan ketimpangan rendah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa tingkat perkembangan wilayah tahun 2018-2022 berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia. Perbedaan ini terlihat pada tingkat perkembangan wilayah baik di setiap faktor, maupun pada indeks komposit. Berdasarkan indeks kompositnya, tingkat perkembangan wilayah paling tinggi di tahun 2018 hingga 2022 selalu diperoleh oleh DKI Jakarta. Sama seperti tingkat perkembangan wilayah, tingkat ketimpangan wilayah di 34 provinsi di Indonesia berbeda-beda pada tahun 2018-2022. Akan tetapi, Indonesia secara umum masuk dalam klasifikasi tingkat ketimpangan wilayah yang tinggi pada lima tahun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan

belum terjadi di Indonesia. Hasil analisis korelasi memberikan arti bahwa terdapat korelasi antara tingkat perkembangan wilayah dengan ketimpangan wilayah di Indonesia. Korelasi ini terjadi pada faktor-faktor TPW tertentu di tahun 2018, 2019, 2020, dan 2022. Di tahun 2021, tidak terjadi korelasi pada setiap faktor TPW dengan ketimpangan wilayah di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penelitian ini.

Referensi

- [1] Muljarijadi B. *Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. Sumedang: UNPAD Press; 2017.
- [2] Anwar A. Ketimpangan spasial pembangunan ekonomi dan modal manusia di Pulau Jawa: Pendekatan explanatory spatial data analysis. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)* 2017;2:90–109.
- [3] Andiyan A, Rachmat A. Analisis Manfaat Pembangunan Infrastruktur Keretaapi Di Pulau Jawa. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 2021;1:121–9. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.22>.
- [4] Kurniawan W. Pengaruh Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Dengan Kewilayahan Sebagai Variabel Moderasi). *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan* 2017;1:22–38. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v1i1.3>.
- [5] Badan Pusat Statistik. *Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022 Tumbuh 5,44 Persen (y-on-y)*. Badan Pusat Statistik 2022.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019* 2015.
- [7] Toana AA, Rosidin A, Nugroho KS, Marbun KN, Kosandi M, Labolo M, et al. *Jakarta Pasca Pindahan Ibu Kota Negara 2023*.
- [8] Dewi O. *Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah dan Hubungannya dengan Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Kudus Tahun 2005 dan 2010*. Undergraduate Thesis. Universitas Negeri Semarang, 2013.
- [9] Efendi F, Daryono. *Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah dan Ketimpangan Antar Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 dan Tahun 2015*. *Swara Bhumi* 2018;5:1–9.
- [10] Ginting ISP. *Tingkat Perkembangan Wilayah dan Disparitas Wilayah Kabupaten Asahan Pasca Pemekaran*. Magister Thesis. Universitas Gadjah Mada, 2017.
- [11] Martono N. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada; 2012.
- [12] Sugiharti L, Fariyah E, Hartadinata OS, Ajija SR. *Statistik multivariat untuk ekonomi dan bisnis: menggunakan software SPSS*. Surabaya: Airlangga University Press; 2021.
- [13] Santoso S. *Statistik Multivariat Edisi Revisi: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo; 2014.

- [14] Albab U, Muta'ali L, Kurniawan A. Analisis Tipologi Desa Tertinggal di Kabupaten Bojonegoro. *Media Komunikasi Geografi* 2019;20:128. <https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.19491>.
- [15] Sjafrizal. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Baduose Media; 2008.
- [16] Widodo S. Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-Sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 2021;6. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.114>.
- [17] Purba D, Purba M. Aplikasi Analisis Korelasi dan Regresi menggunakan Pearson Product Moment dan Simple Linear Regression. *Citra Sains Teknologi* 2022;1:97–103.
- [18] Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta; 2009.
- [19] Suharyat Y. *Metode Penelitian Pendidikan*. Banyumas: Wawasan Ilmu; 2022.
- [20] Care FRAM, Subagio BS, Rahman H. Porous concrete basic property criteria as rigid pavement base layer in indonesia. *MATEC Web of Conferences* 2018;147. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201814702008>.
- [21] Majid MSA. Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan* 2014;8.
- [22] Kahar MS, Ibrahim I, Rusdi A, Sukmawati S. Pemberdayaan Masyarakat Papua Di Distrik Bikar Kabupaten Tambrau Melalui Pemberantasan Buta Aksara. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2019;2:129–38. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.275>.
- [23] Nurcahyo AM. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2022;10.
- [24] Nasution M. Ketimpangan antar wilayah & hubungannya dengan belanja pemerintah: studi di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 2020;5:84–102.
- [25] Faqihuddin F, Sufyadi D, Suyudi S. Kajian Tentang Sektor Pertanian dan Kaitannya dengan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Agristan* 2019;1.
- [26] Hamdika H, Osmet O, Wahyuni S. Sektor Pertanian dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Barat. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture* 2019;1. <https://doi.org/10.25077/joseta.v1i1.5>.
- [27] Murty VK, Shankar SS. Towards a Scalable Architecture for Smart Villages: The Discovery Phase. *Sustainability* 2020;12:7580. <https://doi.org/10.3390/su12187580>.
- [28] Sun Y, Qin Y, Hu Y, Wang S, Bi X. The Correlation Analysis of Education Level and Regional Economic Growth Quality in Guangdong Province. *Proceedings of the 7th International Conference on Social Science and Higher Education (ICSSHE 2021)*, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211122.116>.